STRATEGI FINLANDIA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BAGI WARGA IMIGRAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional

Disusun Oleh:

MAYANG AGNEZTIA PARASASTI
07041181621014

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2020

STRATEGI FINLANDIA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BAGI WARGA IMIGRAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional

Disusun Oleh:

MAYANG AGNEZTIA PARASASTI
07041181621014

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

202

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

STRATEGI FINLANDIA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BAGI WARGA IMIGRAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

MAYANG AGNEZTIA PARASASTI
07041181621014

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 14 Desember 2020

Pembimbing I

Dra. Retno Susilawati, MM.
NIP 19590520 198503 2 003

Pembimbing II

Gunawan Elake Lestari, S.IP., MA.
NIP 19840518 201803 1 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Azhar, SH., M.SC., LL.M.
NIP 19650427 198903 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

STRATEGI FINLANDIA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BAGI WARGA IMIGRAN

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 28 Desember 2020
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dra. Retno Susilawati, MM
Ketua

Gunawan L. Elake., S.IP., MA
Anggota

Dr. Azhar., SH., M.Sc., L.LM
Anggota

Nur Aslamiah Supli., BIAM., M.Sc
Anggota

Indralaya, 28 Desember 2020
Mengesahkan,
Dekan.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri., M.Si.
NIP 19631106 199003 1 001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mayang Agneztia Parasasti

NIM : 07041181621014

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Strategi Finlandia Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Bagi Warga Imigran" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menaggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sunguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 14 Desember 2020

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL

JB4BEAHF702651421

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Mayang Agneztia Parasasti

NIM 07041181621014

HALAMAN PERSEMBAHAN

"Woman can will Nothing unless she has first understood that she must count on no one but herself, that she is alone, abandoned on earth in the midst of her infinite responsibilities. Without help, with no other aim than the one she sets herself, with no other destiny than the one she forges for herself in this earth."

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Ibu yang selalu memberi semangat, doa dan pengorbanan yang luar biasa untuk Mayang. Serta untuk diriku sendiri, terima kasih karena telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan terima kasih telah kuat sampai titik ini. Semoga rahmat Tuhan yang Maha Esa selalu menyertai kita semua. Amin.

INTISARI

Di Finlandia, imigrasi telah menjadi sumber pertumbuhan penduduk serta pertukaran budaya. Populasi imigran terbesar yang masuk ke Finlandia di dominasi oleh negara-negara tetangga seperti Federasi Rusia dan Estonia, selain itu juga banyak para imigran yang berasal dari wilayah yang lebih jauh seperti Suriah dan Somalia. Menurut *Population Reasearch Intsitute*, pada tahun 2014, jumlah imigran di Finlandia mewakili sekitar 4% dari keseluruhan jumlah penduduknya (Institute, 2017). Imigrasi dan integrasi imigran melalui pendidikan di kawasan Eropa telah menjadi fokus penting. Hal ini karena bagi anak-anak pendatang pendidikan menjadi alat utama integrasi

Skripsi ini menganalisis mengenai strategi Finlandia dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan bagi Warga Imigran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendekatan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Finlandia dalam rangka memberikan kesempatan pendidikan yang adil dan setara terhadap imigran. Penulis menggunakan *welfare state theory* sebagai pisau analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian serta mengelaborasikan pembahasan dalam penelitian ini. Teori ini menegaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang termanifestasi dalam rumusan kebijakan pendidikan bagi imigran di Finlandia. Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga sumber dan pengambilan data diutamakan dari dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan kombinasi dari keempat dimensi yang menentukan strategi pemerintah Finlandia dalam menjamin pendidikan bagi warga imigran yang telah dielaborasikan dalam pembahasan. Keempat dimensi tersebut yaitu mencakup analisis mengenai kebijakan pendidikan, kurikulum pendidikan, sumber pendanaan, serta level pendidikan bagi imigran di Finlandia.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Kurikulum Pendidikan, Imigran, *Welfare State*, Keadilan, Kesetaraan.

ABSTRACT

In Finland, immigration has become a source of population growth as well as cultural exchange. The largest immigrant population entering Finland is dominated by neighboring countries such as the Russian Federation and Estonia, as well as many immigrants from further areas such as Syria and Somalia. According to the Population Research Institute, in 2014, the number of immigrants in Finland represented about 4% of the total population (Institute, 2017). Immigration and the integration of immigrants through education in the European region have become an important focus. This is because for the children of migrants, education is the main tool of integration.

This thesis analyzes the Finnish strategy in the implementation of education policies for immigrants. The purpose of this research is to find out what approaches are taken by the Finnish government in order to provide fair and equal educational opportunities for immigrants. The author uses the welfare state theory as an analysis knife to answer research questions and elaborate the discussion in this study. This theory emphasizes the principles of justice and equality which are manifested in the formulation of educational policies for immigrants in Finland. This research is qualitative in nature so that the source and data collection are prioritized from documents.

The results show the combination of the four dimensions that determine the strategy of the Finnish government in ensuring education for immigrant citizens that has been elaborated on in the discussion. The four dimensions include analysis of educational policies, educational curricula, sources of funding, and education levels for immigrants in Finland.

Keywords: Education Policy, Educational Curriculum, Immigrants, Welfare State, Justice, Equality.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, dan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;

2. Diriku sendiri, Terima kasih karena telah berjuang untuk memperoleh data sampai akhir hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih karena tetap kuat meskipun tidak mudah dalam prosesnya, terima kasih karena tidak pernah menyerah dengan keadaan, dan terima kasih karena tetap mampu berpikir dengan positif sampai saat ini;

3. Ibu dan adik-adikku yang telah memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan baik secara moral dan material, sehingga membuka jalan untuk mewujudkan cita-cita penulis;

4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Azhar, SH., M.SC., LL.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;

6. Ibu Dra. Retno Susilawati., MM dan Bapak Gunawan Lestari Elake., S.IP., MA, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;

7. M.Risky Rafedo, selaku sahabat, kakak, dan pacar yang selalu memberikan support baik secara emosional dan material.

8. All member of TEKNIK HI as teman-teman tidak punyaku, kalian luar biasaa!! Asry partner ghibah dan geluttku, Della partner nge-fangirl+nge-haluku, Dian tempat bertanyaku, Syifa si incess Layoo, Eby yg selalu sabar kalo dikatain, dan udaa ajik as duta Sheila on 7 nya THI. Terimakasih udah banyak membantu selama masa kuliah, dan semoga kita semua secepatnya menuju Borjuis, Capek banget jadi kaum Proletar muluuu.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu khususnya dalam lingkup Studi Hubungan Internasional.

Indralaya, 25 Desember 2020

Mayang Agneztia Parasasti
NIM: 07041181621014

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Halaman Persetujuan Pembimbing ii
Halaman Persetujuan Tim Penguji iii
Lembar Pernyataan Orisinalitas iv
Halaman Persembahan v
Intisari vi
Abstract vii
Kata Pengantar viii
Daftar Isi ix
Daftar Tabel xii
Daftar Gambar xiii
Daftar Grafik xiv
Daftar Singkatan xv

BAB 1 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Manfaat Penelitian 8
1.4.1 Manfaat Akademis 8
1.4.2 Manfaat Praktis 8
1.5 Kajian Pustaka 9
1.6 Kerangka Konseptual 12
1.6.1 Konsep Pengungsi 12
1.6.2 Prinsip-Prinsip Pendidikan Berbasis *Welfare State* 12
1.6.2.1 Teori Negara Kesejahteraan 15
1.6.2.2 Prinsip Kesetaraan Kesempatan Bagi Setiap Warga Negara 16
1.6.2.3 Prinsip Keadilan 17
1.6.2.4 Prinsip Akuntabilitas dan Kepercayaan 17

1.6.3 Alur Pemikiran 18
1.7 Argumen Utama 19
1.8 Metode Penelitian 20
1.8.1 Desain Penelitian 20
1.8.2 Definisi Konsep 20
1.8.3 Fokus Penelitian 21
1.8.4 Unit Analisis 22
1.8.5 Jenis dan Sumber Data 23
1.8.6 Teknik Pengumpulan Data 23
1.8.7 Teknik Keabsahan Data 24
1.8.8 Teknik Analisis Data 25

BAB 2 27
2.1 Gambaran Umum Negara Finlandia 27
2.2 Latar Belakang dan Gelombang Kedatangan Imigran di Finlandia 29
2.3 Tren Imigrasi Di Finlandia Saat Ini 34
2.4 Sistem Pendidikan di Finlandia Secara Umum 36

BAB 3 41
3.1 Analisis *Alliens Act* Terhadap Jaminan Pendidikan yang Adil dan Setara 41
3.2 Analisis *Welfare State Concept* dalam Kurikulum Pendidikan Imigran 45
3.3 Analisis Sumber Pendanaan Bagi Pelajar Imigran 49
3.4 Analisis Kebijakan Pendidikan Bagi Imigran Dalam Level Pendidikan 51
3.4.1 Strategi Finlandia dalam Pendidikan Anak Usia Dini bagi Imigran 52
3.4.2 Strategi Finlandia dalam Pendidikan Pra-Sekolah Dasar 53
3.4.3 Strategi Finlandia dalam Pendidikan Dasar bagi Imigran 54
3.4.4 Strategi Finlandia dalam Persiapan Pendidikan Menengah Atas 56
3.4.5 Strategi Finlandia dalam Pendidikan Menengah atas Bagi Imigran 57
3.4.6 Strategi Finlandia dalam Pelatihan Kejuruan Bagi Imigran 58
3.4.7 Strategi Finlandia dalam Pendidikan Dasar untuk Imigran Dewasa 59
3.4.8 Strategi Finlandia dalam Integrasi Bagi Imigran Dewasa 60

BAB 4 ..... **61**
4.1 KESIMPULAN 61
4.2 SARAN 63
Daftar Pustaka..... 64
Lampiran 68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indikator Keberhasilan Pendidikan 3

Tabel 1.2 Jumlah Warga Imigran dan Penduduk yang memperoleh kewarganegaraan Finlandia tahun 1980-2010.....5

Tabel 1.3 Kajian Pustaka.....10

Tabel 1.4 Fokus Penelitian 24

Tabel 3.1 Kesetaraan pendidikan di Finlandia 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Diagram Alur Penelitian..... 21

Gambar 2.1 Peta Negara Finlandia 32

Gambar 2.2 Sistem Pendidikan di Finlandia 39

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Perkembangan Jumlah Warga Asing Di Finlandia 36

Grafik 3.1 Prestasi siswa nattive dan imigran di Finlandia 48

DAFTAR SINGKATAN

GERM	: Global Educational Reform Movement
PISA	: Programm for International Students Assessments
OECD	: Organisation for Economic Co-operation and Development
SDGs	: Sustainable Development Goals
UNHCR	: United Nation High Commissioner for Refugees
MPI	: Migration Policy Institute

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Imigrasi serta integrasi imigran dan keturunannya semakin penting di kawasan Eropa. Bagi anak-anak dengan latar belakang imigran, pendidikan merupakan alat utama integrasi. Dasar kesetaraan antar kelompok etnis diletakkan pada saat wajib belajar dan dilanjutkan pada pendidikan lanjutan. Finlandia merupakan salah satu negara yang menempati peringkat paling positif terhadap imigran (european, 2016). Di Finlandia, imigrasi telah berkembang dengan cukup pesat, serta menjadi sumber pertumbuhan penduduk serta pertukaran budaya. Dibandingkan dengan negara OECD lainnya, Finlandia memiliki sejarah imigrasi yang cukup singkat. Meskipun demikian, studi lain telah menunjukkan bahwa jumlah anak imigran dengan latar belakang budaya yang beragam terus meningkat di Finlandia (Karpinen, 2008). Hal ini berimplikasi terhadap reformasi sistem pendidikan di Finlandia, yaitu untuk memasukkan imigran serta menjamin terlaksananya pendidikan yang adil bagi setiap orang, karena sistem pendidikan di Finlandia dibangun berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan dan demokrasi.

Di Finlandia, akses pendidikan merupakan barang publik yang disediakan oleh negara. Negaralah yang memiliki kendali atas kemandiriannya dalam merumuskan kebijakan nasional yang mengatur bidang pendidikan. Pendidikan telah berfungsi sebagai strategi utama untuk membangun masyarakat yang melek

huruf dan sebagai negara yang saat ini dikenal oleh dunia karena budaya dan prestasi teknologi. Pendidikan di Finlandia murni *public good*, yang artinya investasi berasal dari publik melalui skema pajak, sehingga manfaat hasil pendidikan dapat dinikmati oleh publik juga. Biaya pendidikan di Finlandia sejak sekolah dasar hingga program doktoral telah digratiskan oleh pemerintah, dan hanya 4% dari keseluruhan institusi pendidikan di Finlandia yang tidak didanai oleh pemerintah. Meskipun gratis, Pemerintah Finlandia menjamin kualitas pendidikan tinggi yang baik bagi tiap-tiap sekolah tanpa terkecuali. Hal ini berlaku bagi siswa yang tinggal di daerah perkotaan ataupun pedesaan, siswa yang berasal dari keluarga miskin maupun kaya, siswa yang merupakan warga asli Finlandia maupun siswa yang berasal dari keluarga imigran, serta sekolah yang berada di daerah jarang penduduknya ataupun yang rapat penduduknya.

Pendidikan di Finlandia telah dikenal sebagai pendidikan terbaik di seluruh dunia. Model pendidikan di Finlandia lebih menekankan pada kerja sama, inovasi, kolaborasi, kemampuan kreatif dan kesetaraan, yang didasarkan pada kemampuan belajar mandiri siswa serta model belajar yang berorientasi membangkitkan rasa ingin tahu. Finlandia bahkan menentang "gerakan reformasi pendidikan global" yang didasarkan pada mata pelajaran inti, kompetisi, standarisasi, serta akuntabilitas yang berbasis pada tes (Hafidhah, 2013).

Sejak dikeluarkannya hasil ujian internasional dalam *Program for International Student Assessments (PISA)* oleh *OECD* pada tahun 2000, Finlandia mulai mendapatkan perhatian khusus dari seluruh dunia (Lyen, 2001). Kebijakan pendidikan di Finlandia sangat dipuji dan negara tersebut telah mulai mengekspor

model pendidikannya ke banyak negara di dunia (Hart, 2017). Padahal, sebelum berhasil melakukan transformasi pendidikan publiknya dengan indikator warga negara paling terdidik, kesempatan pendidikan yang merata dengan sumber daya yang efektif, profesional dan efisien, hingga tahun 1960-an Negara Finlandia masih terhitung kurang terdidik, bahkan sampai tahun 1980 Finlandia masih merupakan negara miskin yang capaiannya masih di bawah rata-rata negara *OECD*. Di Finlandia, pendidikan telah berperan sebagai strategi utama dalam membangun sebuah masyarakat terpelajar serta sebuah bangsa yang saat ini dikenal dunia karena prestasi budaya dan teknologinya. Finlandia juga telah membuktikan bahwa ada cara lain dalam membangun sistem pendidikan yang baik dengan menggunakan solusi yang berbeda dari kebijakan pendidikan yang dikendalikan oleh pasar (Sahlberg, 2011).

Untuk menjelaskan secara ringkas mengenai keberhasilan pendidikan di Finlandia dibandingkan dengan negara-negara OECD lainnya, peneliti akan menggunakan beberapa indikator dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Indikator keberhasilan Pendidikan

No	Daftar Indikator Utama	Finlandia	Rata-Rata/ Total	Min	Maks
1	Pengeluaran Publik untuk Pendidikan	6,8%	5,8%	3,8%	8,8%
2	Populasi yang telah mencapai Pendidikan tingkat menengah atas, 25-34thn	90%	82%	43%	98%
3	Rata-rata kinerja membaca	536	439	425	539

4	Populasi pemuda yang tidak terdidik ataupun mendapat pelatihan kerja (15-29thn)	11,8%	15,8%	6,9%	34,6%
5	Proporsi pengeluaran Publik terhadap lembaga pendidikan	97,6%	83,6%	57,9%	97,6%
6	Pertumbuhan PDB	2,7%	1,8%	-7,1%	8,5%
7	Pengeluaran Tahunan per-siswa dalam pendidikan pra-SD	$5.372	$6.762	$2.280	$20.958
8	Pengeluaran Tahunan per-siswa dalam pendidikan Dasar	$7.624	$7.974	$1.860	$21.240
9	Pengeluaran Tahunan per-siswa dalam pendidikan Menengah	$9.162	$9.014	$2.470	$17.633
10	Pengeluaran Tahunan per-siswa dalam pendidikan Tersier	$16.714	$13.528	$6.501	$25.576

Sumber: OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)

Menariknya, Finlandia tidak hanya menetapkan standar tinggi dalam pemberian pendidikan bagi warga negaranya, tetapi juga pemerintah Finlandia menetapkan standar dalam mendidik para siswa imigran dengan penyediaan dukungan belajar yang baik. bahkan, Dewan Pendidikan Nasional Finlandia telah mereformasi kebijakan pendidikannya agar dapat memperkuat integrasi imigran ke dalam sistem pendidikan di Finlandia. Contohnya, dalam pedoman kurikulum inti nasional mengenai pendidikan dan perawatan anak usia dini tahun 2005 secara jelas memertimbangkan mengenai keberagaman latar belakang anak-anak. Dalam kurikulum ini dinyatakan bahwa budaya, adat istiadat serta latar belakang para peserta didik harus dihargai dan didukung secara maksimal. Rencana pendidikan individual juga harus disusun bersama-sama oleh para staf dan orang

tua untuk setiap anak, selain itu anak yang mengalami kesulitan belajar juga harus diserap ke dalam pendidikan khusus untuk bantuan lebih lanjut (Grierson, 2000).

Finlandia memiliki sistem hukum perundang-undangan serta terdapat hirarki statuta di dalamnya. Beberapa undang-undang, peraturan, dan kebijakan di Finlandia menjamin terlindunginya hak-hak semua individu di Finlandia dalam hal pendidikan dan kesetaraan. Konstitusi Finlandia yang ditetapkan dalam undang-undang konstitusional (1999, pasal 16), menetapkan bahwa setiap orang sama dimata hukum. Menurut konstitusi tersebut, tidak ada seorangpun tanpa alasan yang dapat diterima dapat diperlakukan berbeda dari orang lain atas dasar jenis kelamin, usia, asal, bahasa, agama, keyakinan, pendapat, kesehatan, kecacatan atapun alasan lain menyangkut dirinya. Hal ini berarti bahwa imigran juga memiliki hak yang sama dengan penduduk asli Finlandia untuk mendapatkan akses dan jaminan pendidikan yang adil dan setara.

Penelitian ini akan membahas mengenai strategi Finlandia dalam memberikan jaminan pendidikan bagi warga imigran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa prinsip pokok dari kebijakan pendidikan Finlandia pasca reformasi adalah menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua warga. Hal ini juga mencakup gagasan bahwa kualitas kurikulum pendidikan harus terdistribusi secara merata ke semua kelompok sosial dalam masyarakat Finlandia. Sejak bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1995, keberagaman (*diversification*) kultur dan etnis yang ada di Finlandia telah berkembang cukup pesat dibandingkan degan negara-negara Uni Eropa lainnya (Sahlberg, Finnish Lessons, 2011). Di beberapa distrik serta sekolah-sekolah yang terdapat di kota besar,

proporsi populasi imigran generasi pertama dan kedua telah mencapai seperempat dari populasi total. Pada tabel 1.2 di bawah ini, akan ditunjukkan bagaimana pertumbuhan jumlah warga imigran yang ada di Finlandia:

Tabel 1.2 Jumlah Warga Imigran dan Penduduk yang memperoleh kewarganegaraan Finlandia tahun 1980-2010

Tahun	Jumlah Warga Imigran	Penduduk yang memperoleh kewarganegaraan
1980	12.853	621
1990	26.2555	899
2000	91.074	2.977
2010	248.135	4.334

Sumber: Statistics Finland (2011)

Pada tahun 2010, jumlah warga imigran yang ada di Finlandia mencapai 4,7% dari total populasinya, dan mereka bukan penutur asli bahasa Finlandia. Sedangkan pada tahun 2018, terdapat sekitar 402.600 orang asing yang tinggal di Finlandia, itu berarti 7,3% dari populasi. Rendahnya jumlah penduduk yang memperoleh kewarganegaraan Finlandia yaitu karena persyaratan bahwa semua warga negara harus fasih menggunakan bahasa-bahasa setempat. Sehingga tujuan dari mendidik peserta didik dengan latar belakang imigran yaitu untuk membekali mereka dengan keterampilan linguistik dan keterampilan teknis. Sehingga para warga imigran tersebut akan dapat bekerja sebagai anggota yang setara dalam masyarakat Finlandia serta untuk kemudian memberikan mereka peluang dalam studi dan pekerjaan lebih lanjut.

Layanan imigrasi Finlandia dapat memberikan kewarganegaraan Finlandia kepada pemohon yang menyerahkan aplikasi atau pernyataan permohonan

kewarganegaraan Finlandia. Kewarganegaraan Finlandia sendiri dapat diperoleh melalui beberapa syarat, yaitu:

- Seorang anak yang lahir du luar negeri dari seorang pria Finlandia atau ibu yang tidak lahir di Finlandia.
- Seorang anak angkat yang berusia antara 12-17 tahun.
- Mantan warga negara Finlandia.
- Seorang warga negara nordik.
- Pemuda yang berusia antara 18-22 tahun yang telah tinggal cukup lama di Finlandia.

Selain persyaratan di atas, kewarganegaraan Finlandia juga dapat diberikan melalui program naturalisasi. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi untuk program ini yaitu: identitas yang mapan, kemampuan bahasa yang cukup, jangka waktu tinggal yang cukup, berintegritas, sarana pendukung, serta memenuhi kewajiban pembayaran. Finlandia telah menerima cukup banyak permintaan kewarganegaraan. Sehingga, warga Finlandia mungkin juga warga negara lain. Bahkan jika seorang warga Finlandia memiliki lebih dari satu kewarganegaraan, otoritas Finlandia akan menganggapnya sebagai warga negara Finlandia baik di Finlandia maupun di luar negeri. Hal ini pun berimplikasi terhadap pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap warga Finlandia yaitu sektor pendidikan. Adanya jaminan negara yang telah tertera dalam *Alliens Policy* menjamin kesetaraan setiap orang yang tinggal di Finlandia, sehingga akses pendidikan yang sama harus dipenuhi oleh pemerintah Finlandia (Service, 2020).

Garis besar dari kebijakan integrasi imigran adalah rangkaian program yang memiliki tujuan untuk mengikut sertakan para warga imigran ke dalam tatanan

ekonomi, sosial dan politik di Finlandia melalui pemberian jaminan pendidikan yang setara dan berkeadilan. Sehingga para warga imigran akan dapat hidup berdampingan serta mendapatkan posisi sosial yang setara dengan masyarakat asli (*nattive*), selain itu juga agar dapat berkontribusi secara maksimal bagi warga negara barunya. Hal ini juga menyebabkan banyak sekolah di Finlandia harus menyesuaikan diri dengan adanya peningkatan jumlah imigran. Sebagai konsekuensinya, beberapa kota di Finlandia memberlakukan pembatasan pada proporsi jumlah siswa imgiran agar tidak terjadi diskriminasi berdasarkan SARA *(segregation)* (Sahlberg, 2011).

Dalam skripsi ini, peneliti akan mengelaborasikan mengenai bagaimana Strategi Finlandia dalam memberikan kesempatan yang sama bagi warga imigran untuk memperoleh pendidikan yang setara, serta Bagaimana kebijakan pendidikan yang diimplementasikan oleh negara Finlandia dapat menjadi sebuah alternatif kebijakan baru bagi reformasi pendidikan secara global. Penelitian ini akan melihat juga bagaimana proses integrasi para imigran dalam kehidupan sosial di Finlandia melalui pembekalan keterampilan linguistik dan keterampilan lainnya oleh pemerintah.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari pemaparan latar belakang di atas, peneliti sampai pada pertanyaan penelitian (*Research Question*) yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. ***Bagaimana Strategi Finlandia dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Bagi Warga Imigran?***

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis secara komprehensif mengenai implementasi kebijakan pendidikan berbasis *welfare state* di Finlandia. Kemudian penelitian ini juga akan mengelaborasikan lebih lanjut mengenai strategi pemerintah Finlandia dalam memberikan kesempatan pendidikan yang setara serta jaminan pendidikan tinggi terhadap warga imigran di Finlandia.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi para pengambil keputusan di bidang pendidikan dalam mereformasi kebijakan pendidikan, sehingga akan membawa keberhasilan secara nasional ataupun global.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 MANFAAT AKADEMIS

Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan referensi, serta menjadi acuan bagi penulis lainnya mengenai Strategi Finlandia dalam Memberikan Jaminan Kebijakan Pendidikan bagi Warga Imigran, dimana masih terbatasnya penelitian yang membahas mengenai materi ini secara komprehensif. Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya penelitian di bidang Ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam aspek penyediaan

pendidikan yang berkualitas yang juga menjadi salah satu poin penting dalam *Sustainable Development Goals (SDGs).*

1.4.2 MANFAAT PRAKTIS

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan sistem pendidikan di Indonesia, karena dalam penelitian ini akan dielaborasikan berbagai *features* sistem pendidikan di Finlandia dan hal-hal yang menjadikannya berhasil. Penelitian ini juga memberikan referensi mengenai urgensi peran negara terhadap pemberian akses pendidikan untuk seluruh warga negara.

1.5 KAJIAN PUSTAKA

Referensi mengenai Strategi Finlandia dalam Implementasi Kebijakan pendidikan yang setara bagi Warga Imigran masih sangat terbatas, sehingga memberikan tantangan yang cukup besar bagi peneliti. Hal ini jugalah yang menjadi acuan bagi peneliti untuk menulis skripsi mengenai topik ini. Adapun penelitian sebelumnya yang memiliki topik dan ruang lingkup penelitian yang selaras dengan judul dalam penelitian yang akan dibahas yaitu berupa buku, jurnal dan laporan penelitian. Kajian pustaka ini akan dijadikan landasan teoritis dan konseptual yang relevan untuk memecahkan masalah penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang akan digunakan oleh penulis akan dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Table 1.3 Kajian Pustaka

No	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1.	Nama Penulis	Atabonglefac Emilia Nkemasong
	Judul	*Understanding the Lived Experiences of Immigrant Students in Finland*
	Tahun	2018
	Hasil Penelitian	Jurnal ini mengelaborasikan mengenai dukungan pemerintah terhadap pelajar imigran dalam sisitem pendidikan di Finlandia, serta kehidupan pelajar imigran di Finlandia, dan tantangan apa saja yang harus dulalui oleh imigran dalam rangka mencapai keberhasilan akademik di sekolah-sekolah di Finlandia. Jurnal ini juga menjelaskan mengenai persepsi pelajar imigran di sekolah Finlandia melalui pengalaman hidup mereka dan untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana untuk mendukung anak-anak imigran mencapai potensi penuh mereka.
	Perbandingan	Penelitian dalam jurnal ini membahas mengenai bagaimana kehidupan pelajar dengan latar belakang imigran yang mengikuti pendidikan dalam sekolah-sekolah di Finlandia. Sementara diskursus penelitian penulis akan lebih berfokus kepada bagaimana strategi pemerintah Finlandia dalam rangka mencapai kebijakan pendidikan yang adil dan setara untuk warga dengan latar belakang imigran yang tinggal di Finlandia. Serta bagaimana Finlandia dapat berhasil memasukan konsep negara kesejahteraan ke dalam kebijakan pendidikan negaranya.
2.	Nama Penulis	Ainur Rofieq
	Judul	Pelayanan Publik dan *Welfare State*

	Nama Jurnal	*Governance*, Vol. 2, No.1, Hal. 100-111
	Tahun	2011
	Hasil Penelitian	Jurnal ini menjelaskan mengenai pentingnya pelayanan publik sebagai manifestasi dari konsep negara kesejahteraan di Indonesia. Hal ini karena lahirnya rezim demokrasi diharapkan akan mampu memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat melalui alokasi anggaran publik dalam jumlah yang lebih besar. Jurnal ini juga menjelaskan mengenai definsi dan karakteristik dari *welfare state*, model-model *welfare state*, serta berbagai jenis kebijakan sosial dan pelayanan publik.
	Perbandingan	Jurnal ini menjelaskan mengenai pentingnya kinerja pelayanan publik di Indonesia, karena akses pelayanan publiknya seperti layanan kesehatan dan pendidikan belum mampu diakses oleh semua warga negara. Sedangkan, dalam penelitiannya penulis akan menjelaskan mengenai pelayanan pendidikan di negara Finlandia, bagaimana sumber-sumber pendapatan publik di Finlandia dialokasikan untuk pembiayaan akses pendidikan secara merata untuk semua rakyatnya, baik kaya maupun miskin.
3.	Nama Penulis	Elina Kilpi
	Judul	*The Education of Children of Immigrants in Finland*
	Tahun	2010
	Hasil Penelitian	Jurnal ini mengkaji mengenai pendidikan anak-anak imigran di Finlandia, dan fokus pada pencapaian dan transisi sekitar usia 16 tahun. Fokus kajian jurnal ini adalah pada pencapaian pendidikan anak-anak

		imigran di akhir pendidikan wajib dan transisi mereka dari wajib belajar ke pendidikan menengah atas. Jurnal ini juga mengelaborasikan mengenai kelompok etnis dengan latar belakang imigran yang tinggal di Finlandia, serta gambaran singkat mengenai langkah-langkah pendidikan khusus untuk anak-anak dengan latar belakang imigran.
	Perbandingan	Jurnal ini berfokus pada analisis pencapaian belajar oleh anak-anak dengan latar belakang imigran dengan usia 7-16 tahun. Sementara dalam penelitian penulis akan menganalisis mengenai kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh negara Finlandia dengan *Welfare State Theory* sebagai pisau analisisnya.
4.	Nama Penulis	Heidi Harju-Luukkainen and Nele McElvany
	Judul	*Immigrant Student Achievement and Education Policy in Finland*
	Tahun	2018
	Hasil Penelitian	Jurnal ini mengelaborasikan tetang prestasi siswa imigran yang ada di Finlandia, di mana temuan rata-rata mendeskripsikan bahwa anak dengan latar belakang imigran mengalami beberapa kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah karena berbagai aspek terutama kendala bahasa. Jurnal ini juga menjelaskan mengenai tindakan dan kebijakan pendidikan untuk anak dengan latar belakang imigran di Finlandia.
	Perbandingan	Jurnal ini berfokus pada prestasi siswa imigran yang ada di Finlandia serta beberapa tindakan pemerintah untuk anak dengan latar belakang imigran, sementara dalam penelitian ini aspek yang akan

		dikaji ialah terkait strategi Finlandia dalam implementasi kebijakan pendidikan bagi warga imigran, dengan pendekatan *welfare state model.*

Sumber: Diolah oleh penulis

1.6 KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk dapat mengelaborasikan rumusan masalah secara komprehensif serta menganalisis fenomena yang menjadi objek kajian penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa teori dan kosep yang sesuai, yaitu:

1.6.1 Konsep Pengungsi

Definisi dan istilah dari pengungsi (*refugee*), muncul pertama kali pada saat Perang Dunia I, dan merupakan titik kulminasi dari proses panjang terbangunnya sebuah bangsa (Rosman, 2003). Para pengungsi pada Perang Dunia I merupakan orang-orang miskin yang terpaksa harus pergi ke negara lain karena tidak dapat mencari penghidupan akibat perang. Sejak saat itulah istilah pengungsi mulai digunakan.

Dalam konsep pengungsi ini, peneliti menemukan banyak literatur yang membahas mengenai definisi dari pengungsi. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil tiga sumber pendefinisian yang paling umum, yaitu definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi UNHCR, serta definisi dari seorang ahli terkemuka yaitu Pietroo Verri.

Pertama, dalam KBBI yang disebut sebagai Pengungsi adalah penduduk suatu negara yang pindah ke negara lain karena tekanan politik yang bertentangan dnegan aliran politik negara asalnya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995).

Selanjutnya, menurut *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR), menyebutkan definisi pengungsi berdasarkan sebuah konvensi yang dibentuk pada tahun 1951 mengenai Status Pengungsi, mendefinisikan pengungsi sebagai "orang yang dikarenakan ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok tertentu, berada di luar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut." (UNHCR)

Terakhir, yaitu definisi pengungsi menurut Pietri Verri yang memberikan definisi pengungsi dengan mengutip pasal 1 UN Convention on the Sstatue of Refugee tahun 1951, yakni: "*Applies to any person who fled the country of his nationality to avoid persecution of thred of persecution*", atau dapat diterjemahkan bebas sebagai berikut: orang yang meninggalkan negaranya untuk menghindari ancaman/terjadinya penganiayaan.

Dari ketiga definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengungsi adalah orang-orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa takut akan penyiksaan ataupun ancaman penyiksaan. Menurut Irawati Handayani, terdapat dua hal yang menyebabkan adanya pengungsi. Pertama adalah pengungsi yang

disebabkan oleh peristiwa alam (*natural disaster*), dan kedua yaitu pengungsi yang terjadi akibat perbuatan manusia (*human made disaster*).

Kebijakan mengenai migrasi di Finlandia sendiri didasarkan pada tujuan pemerintah, kebijakan imigrasi dan suaka bersama dari Uni Eropa, serta perjanjian internasional. Perjanjian utama yang menjamin mengenai kewajiban negara untuk menerima pengungsi diantaranya adalah:

- Kovensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia
- Konvensi PBB yang menentang penyiksaan
- Konvensi hak anak
- Konvensi Jenewa

Kebijakan migrasi ini bertujuan untuk memastikan Bahwa imigrasi dikelola dengan baik serta dapat berkelanjutan secara sosial, dan menjadikan Finlandia sebagai negara yang aman dan terbuka, di mana setiap orang dapat menemukan peran untuk dimainkan di dalamnya. Selain itu juga harus terciptanya mobilitas tenaga kerja yang lebih baik serta mengendalikan imigran yang datang ke Finlandia. Pengendalian imigran ini dilakukan untuk menjaga status hukum warga negara asing, kewajiban internasional yang harus diberikan oleh Finlandia, serta pertimbangan terhadap keamanan nasional (finland, 2020).

1.6.2 Prinsip-Prinsip Pendidikan *Welfare State*

Terdapat beberapa prinsip dalam kebijakan pendidikan berbasis Welfare State yang diimplementasikan di Finlandia. Prinsip-prinsip tersebut lahir dari tradisi masyarakat serta reformasi pendidikan yang terjadi di Finlandia pada tahun

1960an yang mendifusikan nilai–nilai yang berasaskan kesetaraan dan keadilan sosial untuk seluruh masyarakat Finlandia, yang kemudian dimanifestasikan dalam implementasi kebijakan pendidikan di Finlandia. Selanjutnya untuk memahami prinsip-prinsip tersebut penulis akan menjelaskannya secara lebih komprehensif sebagai berikut:

1.6.2.1 Teori Negara Kesejahteraan *(Welfare State Theory)*

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Welfare State Theory* untuk menjelaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan di Finlandia dilakukan di atas nilai-nilai keadilan dan distribusi sumber daya yang merata bagi tiap warganya. Seperti halnya negara skandinavia lainnya, konsep *welfare state* sangat fokus kepada alokasi kebijakan sosial untuk seluruh rakyatnya serta tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya. Dalam sektor pendidikan di Finlandia, pembiayaan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi dan pendidikan orang dewasa, hampir sepenuhnya dibiayai dengan sumber-sumber publik. Pemerintah Finlandia menjamin penyediaan akses pendidikan untuk publik mulai dari pendidikan dasar, menengah, menengah atas, dan pendidikan tinggi, yang didasarkan pada asas keadilan dan akses yang sama untuk semua warga negara. Hal inilah yang kemudian menyebabkan banyak imigran yang tertarik untuk datang ke Finlandia.

Dalam Encyclopedia Britannica, *welfare state* diartikan sebagai konsep pemerintahan yang bertujuan untuk menjaga dan memajukan kesejahteraan

ekonomi dan sosial warga negara, sehingga negaralah yang harus memainkan peran kunci untuk mencapainya (Britannica, 2008). *Welfare state* seringkali diasosiasikan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga ia dijadikan sebagai sebuah mekanisme pemerataan terhadap kesenjangan yang ditimbulkan oleh ekonomi pasar. Adapun wilayah garapan utama dari pemerintahan yang menganut konsep *welfare state* ini ialah adanya jaminan sosial, kesehatan, perumahan serta pendidikan (Harris, 2009). Oleh karena itu, konsep *welfare state* seringkali didasarkan pada prinsip persamaan kesempatan (*equality of opportunity*), tanggung jawab publik (*public responsibility*) serta pemerataan pendapatan (*equitable distribution of wealth*), terhadap mereka yang secara personal tidak mampu untuk menyediakan kebutuhan minimum untuk dapat hidup dengan layak (Mclean, 2009). Menurut Barr (1987) menyatakan bahwa:

> *The concept of the welfare state defies precise definition. First, the state is not the only source of welfare. Most people find support through the labour market for most of their lives. Individuals can secure their own well-being through private insurance; and private charities, family and friends also provide welfare. Second it does not follow that if a service is financed by the state it mustnecessarily be publicly produced. Welfare is thus a mosaic, with diversity both in its source and in the manner of its delivery. The term 'welfare state' can be thought of 'as a shorthand for the state's role in education, health, housing, poor relief, social insurance and other social services* (Bertram, 2011)*'*

Penulis menggunakan konsep negara kesejahteraan untuk menjelaskan bahwa Pemerintah Finlandia menggunakan Strategi Kebijakan Pendidikan berbasis *Welfare State* dalam rangka menjamin kesetaraan pendidikan bagi para pelajar imigran di sana. Finlandia mengalokasikan banyak sekali anggaran pada sektor pendidikan untuk memastikan bahwa setiap warga negaranya memperoleh pendidikan yang baik dan setara. Prinsip keadilan dan kesetaraan terhadap

pendistribusian kualitas pendidikan inilah yang kemudian menjadi strategi Finlandia dalam implementasi kebijakan pendidikan bagi warga imigrannya. Semua warga Finlandia mampu menikmati pelayanan pendidikan yang baik karena negara menjaminnya dengan pengembangan konsep *'welfare state'*. Konsep dari *'nordic welfare state'* juga telah dimanifestasikan oleh pemerintah Finlandia melalui pemberian akses pendidikan secara merata untuk semua warganya, baik *nattive* maupun imigran.

1.6.2.2 Prinsip kesetaraan kesempatan bagi setiap warga negara

Prinsip kesamaan kesempatan bagi setiap warga serta basis keadilan *social redistributive* merupakan landasan filosofis dari relevansi negara kesejahteraan. Adanya hambatan-hambatan sosial yang harus dihadapi oleh tiap orang karena perbedaan posisi kelas mereka tersebut akan dapat diatasi dengan kehadiran negara kesejahteraan (*welfare state*). Ketika seseorang lahir dan tumbuh, ia telah terikat pada posisi kelasnya masing-masing. Sehingga untuk dapat menjamin kebutuhan hidupnya dan hidup dengan layak, akses dan pengalaman untuk dapat meraih berbagai posisi dan karir yang berkaitan dengan keberadaan lapangan kerja di masyarakat harus dimiliki oleh tiap warga negara. Agar semua orang dapat memiliki akses yang setara untuk dapat bekerja sesuai dengan pilihan dan *passion*nya masing-masing. Akses terhadap pekerjaan yang layak tersebut sangat berhubungan erat dengan redistribusi aset-aset produktif serta akses terhadap pendidikan yang layak. Bagi setiap Negara, adanya pemenuhan kesempatan yang setara untuk setiap warganya agar dapat bekerja dengan layak sifatnya sangatlah

kontekstual. Di tiap-tiap Negara penentuan formulasi seperti apa yang cocok dalam implementasinya, sangat ditentukan oleh formasi sosial yang eksis.

1.6.2.3 Prinsip Keadilan

Di negara-negara Nordik berkesejahteraan, keadilan dalam pendidikan merupakan hal yang penting. Ini berarti bahwa dalam hal pendidikan, semua orang harus mendapatkan akses yang sama sehingga tercapailah keadilan. Berkeadilan dalam pendidikan merupakan sebuah prinsip yang bertujuan untuk memastikan terjaminnya pendidikan berkualitas tinggi untuk semua orang, meskipun tempat dan lingkungan tinggalnya berbeda. Konteks pendidikan berkeadilan di Finlandia memiliki arti bahwa sistem pendidikan yang adil secara sosial dan inklusif harus didasarkan pada terjaminnya kesempatan pendidikan yang sama bagi setiap orang (Sahlberg, Finnish Lessons, 2011, hal. 116).

1.6.2.4 Prinsip Akuntabilitas dan Kepercayaan

Tidak seperti kebanyakan negara yang mengikuti gerakan akuntabilitas pendidikan global yang mengasumsikan bahwa kunci untuk meningkatkan prestasi siswa adalah dengan membuat sekolah dan guru untuk lebih akuntabel terhadap kinerjanya. Di Finlandia, konteks dari akuntabilitas pendidikannya adalah dengan menjaga serta memperkuat rasa saling percaya di antara guru, siswa pimpinan sekolah dan otoritas pendidikan, sehingga di dalam prosesnya keseluruhan elemen tersebut secara aktif ikut dilibatkan agar terciptanya rasa tanggung jawab serta inisiatif profesional yang kuat.

Adanya kultur percaya kepada sekolah ini memiliki arti bahwa para pemimpin politik serta otoritas pendidikan yang ada memberikan kebebasan kepada pemimpin sekolah, guru dan para orang tua dalam mengelola dan menyediakan pendidikan terbaik bagi para siswanya.

1.6.3 ALUR PEMIKIRAN

Reformasi kebijakan pendidikan di Finlandia mulai terealisasi pada tahun 1970. Iklim kebijakan sosial ketika itu telah mengkonsolidasikan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial melintasi kelas-kelas sosial dalam masyarakat Finlandia. Gelombang reformasi dimulai di wilayah-wilayah utara Finlandia pada tahun 1972, dan mencapai urban di selatan pada tahun 1978. Reformasi sekolah terpadu *(peruskoulu)* ini kemudian memicu pengembangan tiga aspek tertentu dalam sistem pendidikan di Finlandia, yang terbukti berperan penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkinerja tinggi. Sementara, gelombang pengungsi di Finlandia mulai terjadi sejak tahun 1800-an, yaitu saat Finlandia berada di bawah kekuasaan Rusia. Selanjutnya mulai tahun 1980-an terdapat sekitar 12.843 Imigran yang datang ke Finlandia dan berasal dari Swedia, Jerman, Uni Soviet, Denmark dan Britania Raya. Penelitian ini akan menganalisis mengenai strategi Finlandia dalam implementasi kebijakan pendidikan yang setara bagi warga imigran. Sangat menarik untuk menganalisisnya dengan konsep kesejahteraan negara (*Welfare State*), di mana prinsip keadilan dan kesetaraan yang merupakan fondasi utama terhadap jaminan pendidikan bagi tiap orang, selain itu alokasi anggaran publik yang dikeluarkan Finlandia cukup besar untuk

pembiayaan pendidikan, dan menghasilkan keberhasilan pendidikan yang telah diakui di kancah global.

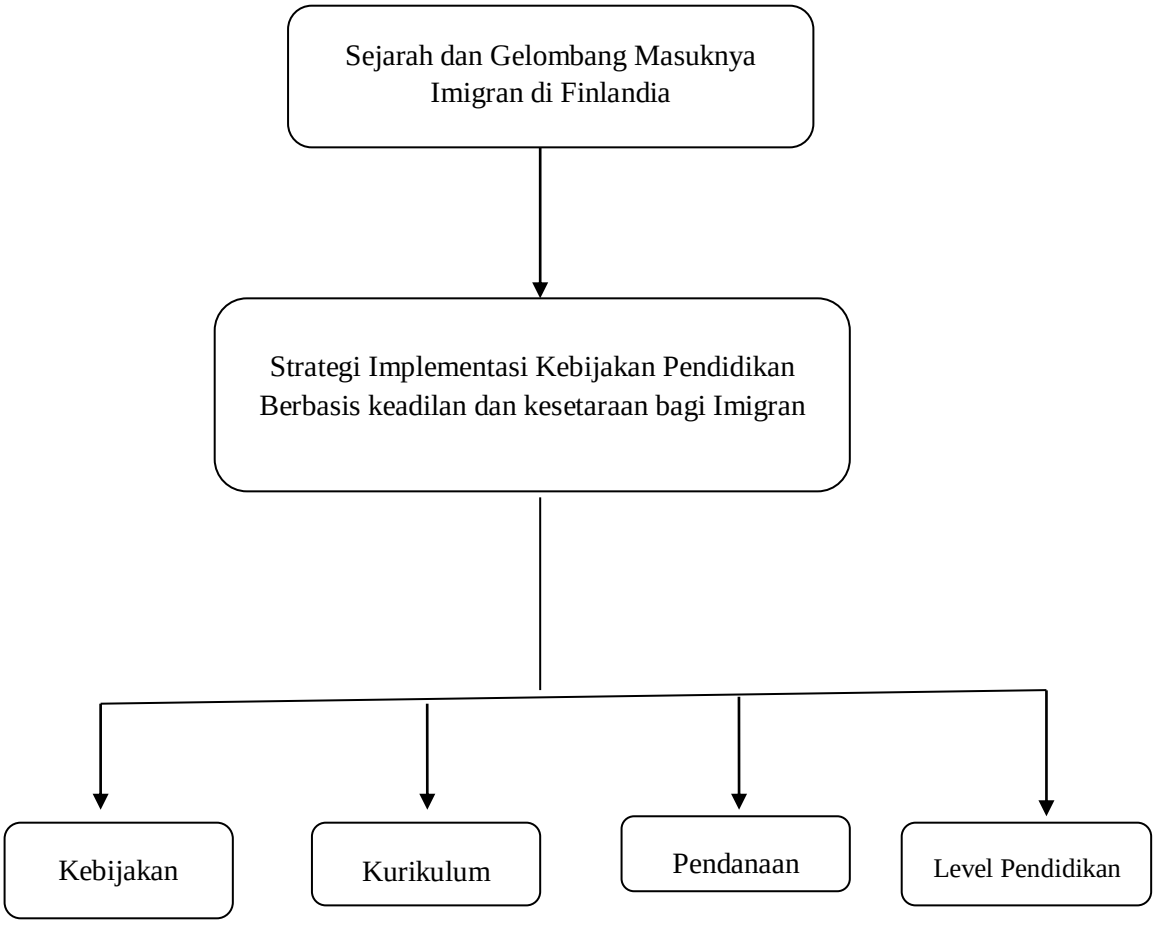

Gambar 1.1 Bagan Diagram Alur Penelitian

1.7 ARGUMEN UTAMA

Strategi Finlandia dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan bagi Warga Imigran adalah dengan menggunakan prinsip keadilan dan kesetaraan yang merupakan manifestasi dari konsep *scandinavian welfare state*. Negara memiliki

peran kunci dalam menjamin akses dan kualitas pendidikan yang baik bagi warga imigran. Jaminan akses serta kualitas pendidikan tersebut telah diatur oleh pemerintah Finlandia dalam beberapa kebijakan yang termanifestasi dalam kurikulum pendidikan bagi imigran di Finlandia.

1.8 METODE PENELITIAN

Penulisan ilmiah selalu membutuhkan data pendukung yang dikumpulkan melalui berbagai prosedur dan langkah-langkah tertentu, inilah yang disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai strategi yang digunakan untuk menjawab persoalan yang dihadapi melalui pengumpulan serta analisis data yang diperlukan. Berikut adalah metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam proses penulisan skripsi ini:

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sekumpulan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif (berupa kata-kata tertulis ataupun lisan). (Furchan, 2007).

Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan adanya fenomena liberalisasi pendidikan secara global, tetapi Finlandia dengan sistem negara kesejahteraannya berhasil mengimplementasikan kebijakan pendidikan berbasis *welfare state* yang berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.

1.8.2 Definisi Konsep

Definisi konseptual merupakan definisi yang terlahir atau terrefleksi dari kajian teori terhadap variabel yang diteliti. Berdasarkan kerangka konseptual yang

telah disajikan dalam poin 1.6, dapat dijelaskan definisi konsep dari variabel penelitian ini sebagai berikut:

1.8.2.1 Konsep Pengungsi

Peneliti menggunakan konsep pengungsi untuk memberikan pemahaman terhadap definisi pengungsi serta memberikan gambaran dari sejarah dan gelombang datangnya imigran di Finlandia.

1.8.2.2 Negara kesejahteraan (*welfare state*)

Konsep negara kesejahteraan mengacu pada pemberian jaminan sosial yang adil da setara bagi tiap lapisan masyarakat di Finlandia. Jaminan kesetaraan dan keadilan inilah yang menjadi landasan dalam strategi finlandia dalam implementasi kebijakan pendidikan bagi imigran. Negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan sebuah konsep pemerintahan yang memberikan jaminan sosial berupa perlindungan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi warga negaranya secara menyeluruh, sehingga pemerintah memiliki peran kunci dalam implementasinya. Adapun hal-hal yang mendasarinya berupa prinsip-prinsip persamaan kesempatan, tanggung jawab publik bagi masyarakat yang kurang mampu, serta pemerataan kekayaan (Setyono, 2019).

1.8.3 Fokus Penelitian

Tabel 1.4 Fokus Penelitian

Variabel	Dimensi	Deskripsi

Strategi Finlandia dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan bagi Warga Imigran	Kebijakan	Kebijakan pendidikan bagi imigran di Finlandia diatur dalam *alliens act* yang bertujuan mengintegrasikan imigran ke dalam masyarakat Finlandia, serta menjamin akses pendidikan yang adil dan setara bagi warga imigran.
	Kurikulum	Kurikulum pendidikan di Finlandia dimanifestasikan oleh prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan akuntabilas.
	Pendanaan	Pendanaan pendidikan di Finlandia menjamin pembiayaan pendidikan gratis bagi integrasi imigran di Finlandia yang berdasarkan pada basis *welfare state concept.*
	Level Pendidikan	Dalam berbagai jenjang/tingkat pendidikan di Finlandia, pemerintahnya memberikan akses pendidikan dari pendidikan dasar hingga pendidikan bagi integrasi imigran dewasa yang berbasis pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.

Sumber: diolah oleh penulis

1.8.4 Unit Analisis

Secara sederhana, unit analisis dapat dipahami sebagai satuan tertentu yang menjadi subjek penelitian (Arikunto, 2010). Subjek ini cakupannya sangat

luas, dapat berupa individu, benda, organisasi, dan waktu tertentu yang disesuaikan dengan fokus permasalahan yang diteliti.

Unit analisis yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Finlandia. Penetapan unit analisis ini karena peneliti ingin mengkaji mengenai Strategi Finlandia dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan bagi Warga Imigran.

1.8.5 Jenis Data dan Sumber Data

1.8.5.1 Jenis Data

Peneliti akan menggunakan data kualitatif, yaitu data yang bentuknya berupa kalimat verbal (kata-kata), bukan dalam bentuk angka. Sumber data kualitatif ini didapatkan dengan menggunakan metode studi dokumentasi/analisis dokumentasi serta studi kepustakaan.

1.8.5.2 Sumber Data

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, peneliti akan menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari berbagai informasi yang dikumpulkan berdasarkan sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder ini berupa, jurnal/*e-journal*, buku, majalah, koran, laporan, artikel di internet, serta berbagai dokumen atau teks tertulis lainnya (Sekaran, 2011).

1.8.6 Teknik pengumpulan data

Peneliti melakukan teknik pengumpulan data untuk mencari dan melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan kualitatif dengan metode *document based research* dan studi kepustakaan.

1.8.6.1 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumentasi yang dimaksud adalah pengumpulan data berupa gambar, tulisan, maupun dokumen lainnya. Sebagian besar data yang tersedia dapat berbentuk catatan harian, peraturan, kebijakan, biografi, dan lain sebagainya (Sugiyono, 2013). Teknik ini ditujukan untuk memperoleh data kualitatif yang dapat menunjang penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi melalui koran, jurnal, serta beberapa artikel dari internet.

1.8.6.2 Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan studi mengenai berbagai buku referensi dan hasil penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya serta akan berguna untuk mendapatkan landasan teori dari rumusan masalah penelitian (Sarwono, 2006). Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan menelaah berbagai buku, jurnal, laporan, catatan serta berbagai literatur yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

1.8.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi. Menurut Norman K. Denkin, triangulasi merupakan

kombinasi dari berbagai metode yang digunakan untuk mengkaji berbagai fenomena yang saling terhubung dengan menggunakan berbagai perspektif yang berbeda. Teknik triangulasi ini meliputi IV hal, yaitu: (I) triangulasi metode, (II) triangulasi antar-peneliti, (III) triangulasi sumber data, serta (IV) triangulasi teori. Dalam penelitian ini triangulasi yang akan digunakan yaitu triangulasi ketiga (triangulasi sumber data). Peneliti menggunakan triangulasi sumber data untuk menggali kebenaran informasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan dokumen tertulis, arsip, catatan resmi serta sumber perolehan data lain, yang selanjutnya akan memberikan *insight* baru bagi penulis. Sehingga akan didapatkan pemahaman baru yang lebih luas serta validasi yang akurat dari berbagai sumber yang telah ada untuk menghasilkan objektivitas dalam penelitian ini.

1.8.8 Teknik Analisis Data

Menurut *Lexy J, Moleong, analisa data* merupakan serangkaian proses yang mengatur dan mengorganisasi data yang ada ke dalam satu kategori, pola serta satuan (moleong, 2007). Analisis data juga dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan untuk menata catatan-catatan hasil studi kepustakaan serta dokumentasi secara sistematis, dan digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kasus yang tengah diteliti serta menyajikannya kepada orang lain.

Terdapat tiga komponen penting yang harus dilakukan oleh peneliti dalam teknik analisis data seperti yang dijelaskan dalam buku *Qualitative Data Analysis*

(Miles & Huberman, 1987). Ketiga komponen penting tersebut akan dijabarkan dalam poin-poin di bawah ini:

1) **Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Reduksi data (*data reduction*) berarti sebuah upaya pemotongan data atau informasi yang dirasa kurang relevan dengan rumusan masalah yang ingin diteliti. Inti dari reduksi data ini ialah untuk melakukan simplifikasi, abstraksi serta memodifikasi berbagai data dan informasi yang telah terkumpul menjadi satu bentuk tulisan *(script)* yang kemudian akan dianalisis. Reduksi data dilakukan untuk mempermudah penenliti mengumpulkan data selanjutnya serta memberikan gambaran yang lebih jelas dan juga meminimalisir pembiasan oleh peneliti (Herdiansyah, 2010).

2) **Penyajian Data (*Data Display*)**

Penyajian data merupakan pengolahan data dari data setengah jadi yang sebelumnya telah diseragamkan dalam bentuk tulisan serta telah memiliki alur tema yang jelas. Tujuan dari penyajian data ini ialah untuk memudahkan peneliti untuk menginterpretasikan keseluruhan bagian dalam penelitian. Terdapat tiga tahapan dalam proses ini yaitu: (i) kategori tema, (ii) sub kategori tema, serta (iii) proses pengkodean.

3) **Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification)***

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan (*verification*) dalam analisis data kualitatif dilakukan untuk membantu peneliti menjawab rumusan masalah penelitian yang telah

ditetapkan. Kesimpulan dapat berupa hipotesis ataupun hubungan antar kausal yang menjadi variabel dalam penelitian.

REFERENCES

Buku

Barnelius, V & Kauppinen T.M. (2011). School *Outcomes and Neighbourhood Effects: A new approach using data from Finland*. In M. Ham, D. Manley, N. Bailey, L. Simpson, & D. Maclennan (Eds), *Neighbourhood effects reasearch: New perspectives.* London: Springer

Bertram, Goff. (2011). *Assesing the Structure of Small Welfare States.* London:*Commonwealth Secretariat and United Nations Research Institute for Social Development*

Brobberg, Gunnar & Roll-Hansen, Nils. (2005). Eugenics And The Welfare State. Michigan: Michigan Sstate University Press

Herdiansyah, Haris. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika

Hugonnier, B. (2007). Globalization and Education: Can the World Meet the Challenges? In M.M. Suarez-Orozco (Ed), Learning in the Global Era: International Perspective on Globalization and Education. Barkeley and Los Angels, California: California University Presss

Moleong, Lexy.J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Rosda Karya

Sahlberg, Pasi. (2011). *Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland.* New York: Teachers College Press, Columbia University.

Setyono, Budi. (2019). Model dan Desain Negara Kesejahteraan. Bandung: Nuansa Cendekia

Suarez-Orozco, C., & Suarez-Orozco, M. M (2001). *Children of Immigration*. London, England: Harvard University

Suarez-Orozco, M. (2001). Globalization, Immigration, and Education: The Research Agenda. Harvard Education Review, 345-366

Sussmuth, Dan R. (2007). On the Mood for Teaching International Skills: Challenges for Educational Globalized World. In M.M. Suarez-Orozco (Ed), Learning in the Global Era: International Perspective on Globalization and Education. Barkeley and Los Angels, California: California University Presss

JURNAL

Cheng, Y.C. (2003). Local Knowledge and Human Development in Globalization of Education. *Centre for Research and International Collaboration Hong Kong Institute of Education*

Djabanor, Jerry Nartey. (2016). Integration of Newly Arrived Immigrant Pupils Into Schools (Focus Ethnography on Preparation for Basic Education in Finland). University of Jyvaskyla Publications

Grierson, Helena. (2000). *Early Childhood Education and Care Policy in Finland*

Harju-Luukkainen, Heidi. (2018). Immigrant Student Achievement and Education Policy in Finland. Diakses pada 16 oktober 2020, pukul 16.42 wib, dari https://www.researchgate.net/publication/323911424

Kilpi, Elina. (2010). Immigrant Education in Finland. St. Antony College: University Oxford Publications

Mense, Evan G. (2018). The Development of Global Higher Education in a World of Transformation. July Press, 2 (3), 47.

Nkemasong, Atabonglefac Emilia. (2018). Understanding the Lived Experiences of Immigrant Students in Finland, University of Eastern Finland Publications

OECD. (2010). *PISA 2009 Results: Overcoming Social Background – Equity in Learning Opportunities and Outcomes (Volume II)*, PISA, OECD Publishing, Paris, doi: 10.1787/9789264091504-en.

OECD (2012), *Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools*, PISA, OECD Publishing, Paris, doi: 10.1787/9789264130852-en.

OECD (2013), *Synergies for Better Learning: An International Perspective on Evaluation and Assessment*, OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education, OECD Publishing, Paris, doi: 10.1787/9789264190658en.

Tangen, R. (2009). *Conceptualizing quality of school life pupil's perspective: A four dimensional model*. International Journal of Inclusive Education, 829-844

Verger, Antoni dan Altinyelken, Hülya Kosar. (2013). Global Education Reform and The New Management of Teachers: A Critical Introduction. *Educational International Research Institute*

ARSIP PEMERINTAH

Ministry of Education and Culture. (*2015*). *Ministry of Education Staregy*: Ministry of Education Helsinski, 2003.

Ministry of Education and Culture. (2016). *The Educational Tracks and Integration of Immigrants* (Problematic Areas and Proposals for Action). Publications of The Ministry of educational and Culture, Finland 2016:6

ARTIKEL ONLINE

Alliens Act [Ulkomaalaislaki 301/2004]. (2004). Retrieved from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040301?search%Btype%5D=pika&search%Bpika%5D=ulkomaalaislaki

Anderson, Jenny. (2011). From Finland, an Intriguing School-Reform Model. Diakses pada 07 desember 2019, dari https://www.nytimes.com/2011/12/13/education/from-finland-an-intriguing-school-reform-model.html.

Hart, John. (2017) The big lesson from the world's best school system? Trust your teachers. diakses pada 07 desember 2019, dari https://www.theguardian.com/teacher-network/2017/aug/09/worlds-best-school-system-trust-teachers-education-finland.

Harris, Neville. (2009). Welfare state. *The New Oxford Companion to Law*. Peter Cane and Joanne Conaghan (eds.). Oxford University Press Inc. Oxford Reference Online. Oxford University Press. University of Washington. Diakses pada, 03 desember 2019, dari http://www.oxfordreference.com.offcampus.lib.washington.edu/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t287.e2323

McLean, Ed Iain and McMillan, Alistair. MC. "Welfare State".*The Concise Oxford Dictionary of Politics*. Oxford University Press 2009. *Oxford Reference Online*. Oxford University Press. University of Washington. Diakses pada 25 Januari 2020, dari http://www.oxfordreference.com.offcampus.lib.washington.edu/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t86.e1462.

REPORT

Statistic System of Europe. (2016). The report of ESS 2015. Luksemburg: European Union Office Publication

Finland Statistics. (2017). Diakses pada 20 september 2020, dari https://www.staf.fi/til/tuottajat_en

Migration Policy Institue. (2015). Diakses pada 20 november 2020, dari https://www.migrationpolicy.org/article/finlands-balancing-act-labor-markethumanitarian-relief-and-immigrat-integration

WEB PAGE

Kausar, Hafidhah. (2013). Belajar dari Sistem Pendidikan Finlandia. Diakses pada 15 desember 2019, pukul 09.49 wib, dari https://www1-media.acehprov.go.id/uploads/pendidikan_di_finlandia.pdf.

Constitutional Act [Suomen Perustuslaki 731/1999]. (1999). Retrieved from http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/en19990731

Encyclopedia Britannica. (2008). *Welfare State*. Diakses pada 03 desember 2019, dari http://www.britannica.com/print/topic/639266

Finnish Imigration Service. (2020). Finnish Citizenship. Diakses pada 15 september 2020, dari https://migri.fi.en.finnish-citizenship.

Lyen, Jack. (2001). Who's no.1? Finland, Japan, and Korea, Says OECD Education Study. Diakses pada 07 desember 2019, dari https://siteselection.com/ssinsider/snapshot/sf011210.htm.

OECD. (2019). Program for International Student Assassment. Diakses pada 07 desember 2019, dari https://www.oecd.org/pisa/PISA-results_ENGLISH.png

Ministry of Education and Culture (n.d.). Education System in Finland. Diakses pada 18 maret 2020, dari http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/koulutusjaerjestelmae/liitteet/finnish_education.pdf.

Ministry of the Interior Finland. (2020). Migration and asylum policy in Finland. Diakses pada 15 september 2020, dari https://intermin.fi/en/areas-of-expertise/migration